



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	23 OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Inspektorat Bakal Lapor Kejaksaan

Terkait Proyek Asal-asalan

PANDEGLANG – Sedikitnya sembilan perusahaan melakukan tindakan pelanggaran dengan mengurangi volume di tahun 2018 lalu. Akibat ulah itu, kini hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. Oleh karena pihak perusahaan telah merugikan negara hingga Rp1 miliar, dan diminta segera mengembalikan kelebihan pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan paling lambat enam bulan setelah rekomendasi diberikan.

Apabila pihak ketiga tidak mengindahkan, Pemkab Pandeglang akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang untuk menyelesaikannya.

Diketahui, perusahaan yang melakukan pelanggaran itu adalah CV MSU kelebihan pembayaran sebesar Rp48,666 juta dan CB TBU kelebihan pembayaran sebesar Rp38,564 juta. Keduanya mengerjakan tiga paket proyek gedung dan bangunan dengan nilai kontrak sebesar Rp162,730 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp23,393 juta.

Kemudian CV AMS kelebihan pembayaran sebesar Rp14,453 juta, PT KRU

sebesar Rp119,285 juta, dan CV ATM sebesar Rp71,175 juta. Ketiganya mengerjakan lima paket pembangunan jalan dan irigasi tidak sesuai spesifikasi nilai kontrak sebesar Rp233,914 juta.

Selanjutnya, CV SJP kelebihan pembayaran sebesar Rp75,5 juta atas tiga paket proyek pembangunan gedung dan bangunan di dua OPD tidak sesuai spesifikasi dengan nilai kontrak sebesar Rp162,730 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp23,393 juta.

Selain itu, CV AJ kelebihan pembayaran sebesar Rp3,921 juta, CV Sj sebesar Rp12,045 juta, dan CV DPM sebesar Rp3,732 juta atas pengerjaan jalan lingkungan tidak sesuai spesifikasi dengan nilai kontrak sebesar Rp19,700 juta.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Evaluasi dan Pelaporan (Evlap) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Kodir Aditia mengatakan, secara keseluruhan instansinya menemukan adanya kelebihan pembayaran proyek hingga Rp1 miliar lebih. Akan tetapi, lanjutnya, beberapa perusahaan telah melakukan pengembalian atas temuan tersebut. "Secara keseluruhan lebih dari Rp1 miliar. Tetapi secara bertahap jumlahnya berkurang, karena ada yang mengembalikannya," katanya kepada *Radat Banten* di ruang kerjanya, kemarin.

Kodir menerangkan, perusahaan



MEMERIKSA BERKAS: Kasubag Evaluasi dan Pelaporan (Evlap) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Kodir Aditia (kanan) memeriksa berkas laporan kelebihan pembayaran di ruang kerjanya, Selasa (22/10).

yang melakukan pelanggaran itu mengerjakan paket proyek di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan ESDM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan beberapa OPD lainnya. "Untuk proyek di Dinkes sudah selesai dan semuanya sudah melakukan pengembalian," katanya.

Kodir mengatakan, perusahaan yang bermasalah tersebut masih dipakai oleh OPD terkait untuk mengerjakan proyek pembangunan. "Iya masih dipakai juga oleh dinas terkait. Tetapi, kita sudah sampaikan apabila sampai

November ini tidak dikembalikan kelebihan pembayarannya, kita akan sampaikan kepada pihak Kejaksaan agar dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pandeglang Raden Yunce Dewi berjanji akan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua hasil pembangunan di Pandeglang. Tujuannya, agar tidak ada perusahaan yang mengerjakan proyek dengan asal-asalan. "Pengawasan tentunya selalu kita lakukan, baik dari tahap perencanaan sampai penyerahan hasil pembangunan. Apabila ada persoalan di lapangan, langsung kita tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," katanya. **(dib/zis)**